

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Keberhasilan Indonesia dalam menjalankan diplomasi ekonomi pada reaktivasi perundingan IK-CEPA diawali dengan tahap *taking the lead*, di mana Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Luar Negeri berperan sebagai aktor utama dalam proses negosiasi. Posisi Korea Selatan sebagai mitra dagang non-tradisional dijadikan dasar strategis bagi Indonesia untuk mendorong ekspor dan mempererat kemitraan melalui jalur diplomasi ekonomi. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan *external consultation*, yakni melalui diskusi aktif antara tim perunding dan berbagai pemangku kepentingan eksternal, seperti KADIN, perusahaan swasta asal Korea Selatan, serta kalangan akademisi dan lembaga riset. Konsultasi tersebut bertujuan untuk memetakan kebutuhan serta aspirasi sektor usaha, agar strategi negosiasi dapat disusun secara menyeluruh, kontekstual, dan responsif terhadap perkembangan pasar global.

Dalam tahap *internal coordination*, tim perunding Indonesia secara aktif membangun berkolaborasi dengan berbagai kementerian teknis, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian. Tujuannya adalah untuk menyatukan arah kebijakan dan menciptakan sinergi antarlembaga, sekaligus menyelesaikan potensi konflik kepentingan yang dapat menghambat proses negosiasi. Tahap ini menjadi landasan utama bagi *political decision*, yakni saat hasil koordinasi dan draf kebijakan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, proses *political legitimation* dilaksanakan melalui peran aktif DPR RI, yang memberikan legitimasi politik terhadap keberlanjutan perundingan. Keterlibatan DPR ini memberikan dasar hukum yang kuat dan memperkuat posisi Indonesia dalam forum negosiasi internasional.

Setelah memperoleh legitimasi politik, proses berlanjut ke tahap *international negotiation*, yang ditandai dengan pelaksanaan tiga putaran

negosiasi intensif selama tahun 2019 di Korea Selatan dan Indonesia. Delegasi Indonesia, yang diketuai oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Iman Pembagyo, berhasil menyelesaikan berbagai isu teknis dalam perjanjian, termasuk penghapusan hambatan perdagangan serta penyusunan komitmen investasi bilateral. Hasil negosiasi tersebut kemudian dilanjutkan ke tahap *ratification of agreement*, yaitu proses pengesahan resmi di masing-masing negara. Dimana perundingan IK-CEPA ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2020 di Busan, dan di Indonesia, ratifikasi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2022 pada 27 September 2022, setelah melewati mekanisme legislasi yang terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, menandai berlakunya Indonesia–Korea CEPA secara sah dan mengikat.

Melalui ketujuh tahapan tersebut, strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam reaktivasi perundingan IK-CEPA terbukti efektif. Pendekatan yang sistematis, dengan pelibatan berbagai aktor domestik dan eksternal serta dukungan legitimasi politik yang kokoh, memungkinkan Indonesia mengartikulasikan dan mengamankan kepentingan nasional dalam kerangka kerja sama ekonomi bilateral. IK-CEPA tidak hanya merepresentasikan capaian keberhasilan diplomatik, melainkan juga mencerminkan peningkatan kapasitas diplomasi ekonomi Indonesia yang semakin adaptif terhadap perubahan global dan responsif terhadap tuntutan pembangunan nasional. Keberhasilan ini dapat dijadikan model strategis dalam merumuskan dan melaksanakan perjanjian perdagangan internasional di masa depan.

6.2 Saran

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini yang meliputi pembahasan, hasil penelitian, hingga kesimpulannya ada pula beberapa saran yang dapat diterapkan bagi penelitian berikutnya secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Teoritis

Mengingat masih terdapat sejumlah keterbatasan dalam penelitian ini, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan

bagi pengembangan studi lanjutan terkait diplomasi ekonomi dalam konteks perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mendalami pendekatan-pendekatan dalam konsep ekonomi politik global dan hubungan internasional, serta melakukan analisis perbandingan terhadap strategi diplomasi ekonomi Indonesia dengan negara lain dalam proses negosiasi CEPA. Hal ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan kajian akademik di bidang hubungan internasional dan kebijakan luar negeri. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian selanjutnya.

2. Praktis

Saran praktis ditujukan kepada Pemerintah Indonesia, khususnya kepada Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan, agar mempertahankan strategi yang telah diterapkan dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi, mengingat efektivitasnya dalam mendukung keberhasilan negosiasi dan tercapainya kesepakatan kerja sama ekonomi seperti IK-CEPA. Strategi tersebut juga sebaiknya dijadikan acuan untuk pelaksanaan diplomasi ekonomi pada masa mendatang. Selain itu, penulis menyarankan agar koordinasi antar-lembaga terkait diperkuat dalam merumuskan strategi diplomasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan dinamika global. Pemerintah Indonesia diharapkan terus mengembangkan upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan diplomasi ekonomi dengan negara-negara mitra strategis.